Surat Kabar Mahasiswa UGM | Edisi 48 | Senin, 17 Maret 2003

BALKON

BALAIRUNG KORAN

Permainan Yang Usang

"Dulu Mereka Masih Berharap pada UGM"
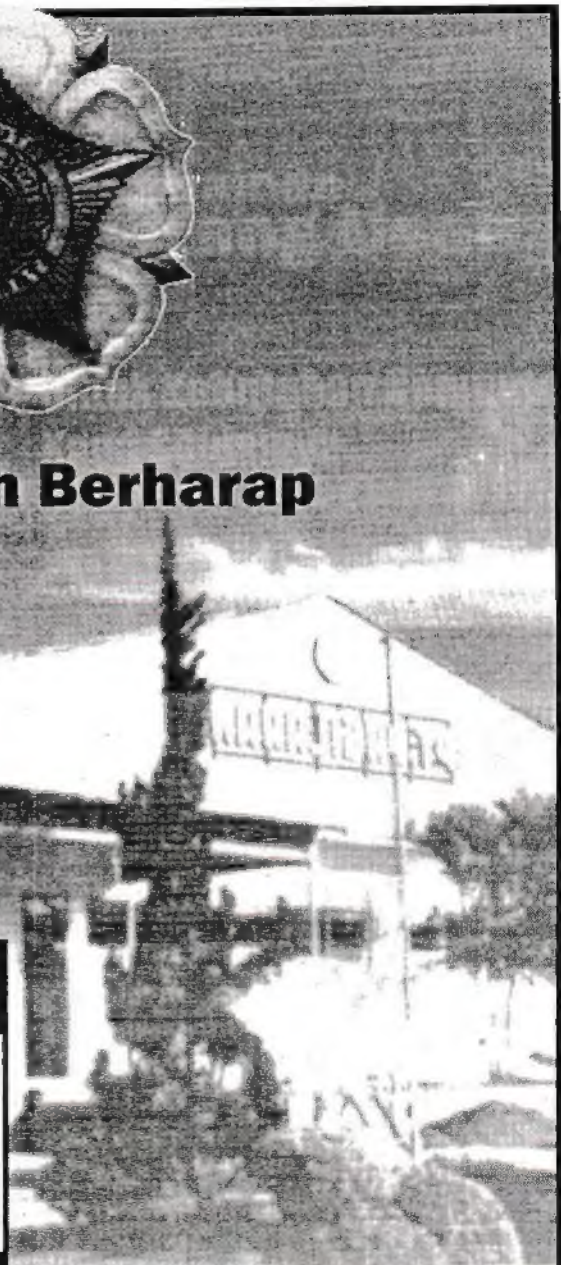
Kasus Pagilaran,

Kasus tanah Pagilaran kembali mencuat ke permukaan, Rabu 26 Februari 2003 sekira dua ribuan petani yang tergabung dalam Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) melakukan aksi demo menuntut pengembalian lahan yang selama ini digarap oleh PT Pagilaran.

Dalam demo yang dilakukan sejak pagi-pagi buta itu, para petani mengajukan tiga tuntutan. Pertama Kembalikan lahan petani untuk tanah garapan, kedua lahan pemukiman bagi petani, ketiga naikkan upah buruh.

Namun dalam aksi demo, pihak UGM menyatakan tuntutan FPPB salah alamat karena UGM bukan pengelola hak guna usaha (HGU) di PT Pagilaran. Ketika ditemui oleh negosiator dan pendamping petani di gedung pusat, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr.Ir. Edhi Martono, M.Sc. mewakili Rektor yang sedang berada di Jakarta, mengatakan bahwa PT Pagilaran bukan milik UGM.

Oleh Edhi Martono dijelaskan bahwa PT Pagilaran adalah milik sebuah yayasan yang beranggotakan dosen-dosen Fak. Pertanian UGM. "Karena itu, UGM tidak dapat memutuskan kebijakan apapun dalam persoalan ini. Dan jika terdapat pelanggaran dari pihak PT Pagilaran, warga dipersilakan mengadu kepada kepolisian atau menempuh jalur hukum," kata Edhi Martono.

Alotnya proses negosiasi dengan pihak rektorat itu, membuat massa yang terhadang di depan pintu masuk menuju Gedung Pusat semakin terlihat emosi. Kekecewaan itu berbuntut kepada jebolnya pagar yang menutup jalan ke arah gedung pusat barat kampus Fak Ilmu Budaya.

Bukan massa petani saja yang kecewa, Lembaga Bantuan Hukum Semarang sempat dibuat gusar dengan statement pihak UGM tersebut. Menurut S. Rahma Mary, SH, kuasa hukum petani dari LBH Semarang menyatakan konflik saat ini tidak lepas dari sejarah hak guna usaha (HGU) yang diserahkan pemerintah RI pada UGM, dan bukannya kepada Yayasan Pembina Fakultas Pertanian (YPFP). Padahal tanah tersebut mulanya milik para petani, "Dokumen-dokumen maupun saksi sejarah yang masih hidup membuktikan bahwa petani adalah pemilik sebelum UGM datang" ujar Rahma. Rahma pun menyayangkan sikap menunggu pemerintah dalam merespon kasus ini.

Masih menurut Rahma, tuntutan yang dilakukan oleh FPPB tidak salah alamat, ini karena pemerintah cenderung menunggu UGM untuk melepaskan tanah, karena pemerintah tidak ada niat untuk membela petani. "Dengan demikian, tuntutan petani ke UGM tidak salah alamat, karena untuk menyelesaikan proses ini harus ada niat baik dari UGM untuk melepaskan tanah terlebih dahulu," papar Rahma.

Perkembangan kasus yang ditangani LBH Semarang pun tidak banyak mengalami kemajuan dalam hal prosedural hukum. "Advokasi yang kami lakukan bukan melulu melalui proses peradilan, akan tetapi diantaranya kampanye isu, pendidikan politik pun kami lakukan sebagai bentuk memberikan informasi dan membuka kesadaran masyarakat untuk terus memperjuangkan hak-haknya," jelasnya

Bila dirunut, kasus Pagilaran bermula dari Penguasaan hak guna usaha (HGU) atas nama PT Pagilaran yang sedianya dijadikan kebun pendidikan dan penelitian, namun dikemudian hari penggunannya lebih bersifat komersil. Areal lahan perkebunan seluas 1131,6121 Ha yang mencakup beberapa desa di Kabupaten Batang Jawa Tengah itu, akhirnya hanya 0,6 Ha saja yang menjadi lahan pendidikan dan penelitian.

Dengan SK menteri PTIP diserahkan lahan pada UGM yang kemudian dikelola oleh Fak. Pertanian UGM. Perkembangan selanjutnya, areal lahan yang tadinya seluas 663 ha pada kontrak HGU pertama (lihat kronologis) di tahun 1964, belakangan hari bertambah menjadi 1131,6121 Ha di kontrak HGU kedua tahun 1983, pengelolaan beralih pada YPFP. Pengalihan itu dilakukan karena pemerintah waktu itu tidak mengijinkan institusi pendidikan menjalankan unit bisnis. Atas dasar itulah, kontrak kedua HGU akhirnya berpindah pengelolaannya ke tangan YPFP. Namun, YPFP secara legal formal mempunyai mekanisme tersendiri yang lepas dari struktur fakultas pertanian. Hal inilah yang menjadi polemik dan konflik berkepanjangan sampai kini.

Meski secara ex officio, dekan

UGM Lepas Tangan

fakultas pertanian adalah ketua yayasan sekaligus ketua dewan komisaris PT Pagilaran, "Namun yayasan maupun PT Pagilaran tidak mempunyai kewajiban apapun karena tata hukumnya telah keluar dengan lembaran negara masing-masing," ujar Dr Ir. Susamto Somowiyarjo M.Sc. Dekan Fak. Pertanian

Maka tak heran, kontribusi PT Pagilaran terhadap Fak. Pertanian UGM, hanya sebatas penunjangan terhadap pendidikan dan penelitian. Mekanisme pemegang saham pun menegaskan bahwa sebagian besar keuntungan PT Pagilaran hanya akan dirasakan oleh pemilik saham. Ir. Moersantoro Pringgosapoetro, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, menegaskan hubungan yayasan dengan fakultas hanya sebatas hubungan fungsional. "Kontribusi yayasan hanya pada pengembangan pendidikan, misal memberikan beasiswa untuk melanjutkan program S2 dan S3 bagi anggota yayasan," katanya.

Sementara itu, dinamika kasus pagilaran tidak sepanas yang terjadi di mahasiswa Fak Pertanian UGM. Setelah aksi pertama petani Pagilaran di kampus UGM tahun 2000, praktis keterlibatan mahasiswa Fak. Pertanian UGM semakin surut. Lewat pernyataan sikap Senat Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa UGM sehari setelah bedah kasus tanggal 19 Februari 2003 yang diselenggarakan oleh Badan Persiapan Aksi Korban PT Pagilaran, memilih netral dalam masalah pengembalian lahan garapan Pagilaran. Teguh Wahyono, Ketua BEM Fak Pertanian mengungkapkan, minimnya informasi dan tidak terbukanya fakultas dalam kasus PT Pagilaran, menyulitkan mahasiswa untuk mengetahui simpul-simpul persengketaan yang akan menuju penyelesaian."Kedua belah pihak hendaknya mengeluarkan pernyataan dan data yang diklaimnya," tandas Teguh.

Sikap dingin justru ditampilkan PT Pagilaran, Ir.Heri Saksono, Direktur Utama PT Pagilaran, tidak ambil pusing dengan tuntutan tersebut. "Kalau kita menanggapi dengan mengeluarkan buku semacam keluaran LBH Semarang, kasusnya nanti malah lebih riuh kembali. Kita percayakan saja lewat jalur hukum," kata Heri yang kesehariannya mengajar pada jurusan perikanan Fak. Pertanian UGM.

Konflik kepentingan justru terjadi di tubuh pengajar Fak. Pertanian yang juga menjadi pimpinan di PT Pagilaran. Hal ini dialami oleh Kusri, mahasiswi Pertanian '98 yang terlibat aksi tahun 2000, mengakui dirinya dan beberapa kawan senat dan BEM fakultas yang terlibat aksi dipanggil oleh pihak dekanat maupun jurusan."Saya ditanya dengan nada interogatif seputar keterlibatan di aksi itu. Bahkan mereka menanyakan organisasi yang saya ikuti karena kecurigaannya saya anggota PRD (Partai Rakyat Demokratik-Red)," kata Kusri.

Pemanggilan itu terulang kembali, tatkala aksi FPPB (26/2), seminggu setelahnya Kusri dipanggil ketua jurusan perikanan, pertanyaan yang diajukan masih tetap sama. "Lebih parah lagi, dimuka perkuliahan, pendiskreditan mahasiswa yang mengotak-atik PT Pagilaran justru lebih sengit dengan mengatakan mahasiswa pendemo tidak tahu berterimakasih lah, dengan alasan kontribusi PT Pagilaran dalam menunjang akademik fakultas sangat besar," ungkapnya kesal.

Hal senada pun dialami Helda, mantan Ketua Senat Fak. Pertanian, "Mereka bisa bilang kontribusi PT Pagilaran sangat besar untuk menunjang akademik, namun ketika kami menanyakan transparansi berkali-kali, mereka mengelak membukanya dengan pelbagai alasan. Di beberapa jurusan, malah beban praktikum bisa mencapai Rp 200 ribu," katanya.

Tudingan ini dijawab Susamto, bahwa semua pengaturan akuntabilitas memakai mekanisme masing-masing lembaga. "Kalau menanyakan keuangan PT Pagilaran tidak semudah itu, karena yang berhak adalah anggota Rapat Umum Pemegang Saham. Begitupun dengan fakultas, kami hanya mempertanggungjawabkannya ke rektorat," paparnya.

Soundy | Asep | Dia | Mamad

Lahan PN Pagilaran bertambah luas setelah penguasaan lahan petani yang ditutup menjadi sekitar 836 Ha, dikukuhkan dengan terbitnya sertifikat HGU untuk kontrak 17 Oktober 1969 - 7 Februari 1989

Hak Guna Usaha (HGU) Inggris berakhir, lahan diambil alih negara

23 Mei 1964
Setelah sebelumnya mengajukan proposal pengusaan lahan untuk sarana pendidikan dan penelitian, HGU diserahkan ke UGM dengan SK menteri PTIP Prof. Dr.Ir. Toyip. Luas awal lahannya 663 Ha dengan nama PN. (Perkebunan Negara) Pagilaran

April 1969
Ekses peristiwa 1965, UGM melakukan penutupan lahan garapan warga yang diduga terlibat G 30 S/PKI.

1 Januari 1974
Status Pagilaran berubah dari PN. menjadi PT.

5 Mei 1977
Lahan bertambah di Segayung Utara dengan SK. Mendagri No. 14/HGU/DA/77

28 Juni 1983
PT. Pagilaran mengajukan perpanjangan kontrak, meski kontrak belum habis. Ini disetujui dengan SK mendagri No. 15/HGU/DA/1983 dengan HGU atas tanah seluas 1131,6121 Ha sampai tahun 2008

Untuk mencukupi kekurangan 1131, 6121 Ha PT. Pagilaran kembali meluaskan lahan di Desa Keteleng seluas 52 Ha, Desa Bismo 6 Ha, dan Desa Bawang 12 Ha.

Diolah dari berbagai sumber

1964 1969 1974 1977 1983 1985

Grafis : Ab

BOP Pertanian ke Pagilaran?

Beberapa tahun terakhir, perusahaan milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian (YPFP) dirundung masalah. Yang terakhir, muncul dugaan terlibatnya dana BOP (Biaya Operasional Pendidikan) Fakultas Pertanian di PT. Pagilaran untuk menutupi kerugian yang dideritanya.

Ketidakjelasan dana inilah yang kemudian menguatkan dugaan ada keterkaitan antara kerugian PT Pagilaran dan belum adanya program alokasi BOP di Fak. Pertanian.

Ir. Irfan, salah seorang direktur PT. Pagilaran, menyatakan bahwa PT. Pagilaran praktis merugi sejak dikembangkannya eksperimen Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Dalam konsep kemitraan yang melibatkan rakyat ini, negara seharusnya memberikan dana. Ternyata, dana dari negara tidak kunjung turun. Selanjutnya, PT. Pagilaran yang menalangi. Di tengah jalan, PIR ternyata gagal dan rakyat tidak mampu bayar kepada PT. Pagilaran.

"Eksperimen PIR betul-betul menghabiskan dana dan tenaga, bahkan kami hutang pada pemerintah karena rakyat ngemplang tidak mau bayar. Sehingga kontribusi dalam bentuk dana kepada Fakultas Pertanian sampai kini tidak ada. Kami hanya mampu menampung praktikum dan penelitian," jelas Irfan.

Hal senada juga ditegaskan Dekan Fakultas Pertanian, Dr. Ir. Susamto Somowiyarjo, M.Sc., yang juga ketua dewan komisaris PT. Pagilaran. "selama ini, kontribusi PT. Pagilaran terhadap fakultas hanya berbentuk memberikan tempat bagi mahasiswa dan dosen untuk melakukan penelitian maupun praktikum," Kata Susamto yang juga menjabat ketua YPFP ini.

Namun, hal berbeda mengenai pertanggungjawaban terhadap kerugian malah meluncur dari pernyataan Susamto. "Seluruh investasi yang dilakukan PT pagilaran, termasuk PIR, adalah tanggung jawab perusahaan. Kalau pun terjadi kegagalan, yang menanggung adalah perusahaan bukan masyarakat," katanya.

Kerugian inilah yang membuat PT. Pagilaran berhutang kepada negara, sehingga dividen (keuntungan saham) habis digunakan untuk pembayaran hutang. Benarkah PT Pagilaran tidak untung?

Dengan berkelakar, Irfan menunjukkan mobil salah seorang direksinya yang keluaran tahun 80-an. "untuk penyedian mobil dinas saja tidak ada. Itulah mengapa kami tidak menggunakan tenaga profesional yang harus disediakan fasilitas. Di samping itu, ada ketakutan perusahaan hanya digunakan untuk komersil," katanya.

Mengenai isu dilibatkannya dana BOP Fak. Pertanian, Irfan yang didampingi Direktur Utama PT. Pagilaran, Ir. Heri saksono malah kembali berkelakar, "kalau BOP ada di pagilaran, wah mobil saya bisa ganti."

Di tempat terpisah, Ir. Sri Wedhastri, MS., Wakil Dekan bidang keuangan Fak. Pertanian, juga menepis isu tersebut. Menurutnya, kalaupun ada penggunaan dana BOP, itu hanya digunakan untuk menutupi biaya transportasi dan konsumsi mahasiswa jika ada penelitian atau kunjungan ke Pagilaran.

Ia menambahkan dengan keras, "keliru persepsi itu! Fakultas sendiri belum memutuskan penggunaan dana BOP. Jadi sifatnya masih usulan. Dan tidak benar dana BOP dipakai di Pagilaran." Lebih rinci, ia memberikan rencana alokasi BOP (lihat tabel).

Sedikit berbeda dengan rekannya, Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, Ir. Moersantoro Pringgosapoetro, menyatakan ada kemungkinan dana BOP dipakai sepanjang berkaitan dengan pendidikan dan penelitian di Pagilaran. "BOP tidak boleh diputar di Pagilaran. Tetapi jika ada kaitannya dengan proses akademik dalam penelitian dan praktikum, itu bisa," tegasnya.

Sementara Teguh Wahyono, ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) pertanian, bahkan tidak tahu menahu ada isu ini walau lembaganya ketiban untung dalam alokasi BOP.

Lebih jauh, Moersantoro menyesalkan kurang adanya komunikasi walau pihak fakultas sering melakukan public hearing yang diikuti oleh sivitas akademika. Karena dengan forum inilah, harapannya, hal-hal yang menimbulkan kecurigaan bisa diselesaikan.

Asep | Soundny | Mamad | Dia

Tabel alokasi BOP di Fakultas Pertanian UGM

No	alokasi	jumlah (%)
1	Praktikum	50
2	IT (bersama universitas)	8
3	Sarana & prasarana (peralatan & perpustakaan)	17
4	Honorarium pekerja tidak tetap	13
5	Kegiatan mahasiswa	7
6	Antisipasi terhadap mahasiswa yang tidak mampu bayar	5

wawancara tema

"Dulu Mereka Masih Berharap pada UGM"

Rabu, 26 Februari lalu, UGM didatangi dua ribuan petani dari Pagilaran. Mereka menuntut pengembalian lahan yang selama ini digarap PT. Pagilaran. Untuk mengetahui kejelasannya, BALKON mewawancarai S. Rahma Mary H, SH., aktivis LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Semarang, selaku kuasa hukum masyarakat Pagilaran. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana perkembangan kasus Pagilaran saat ini?

Kasusnya mandeg karena advokasi instansi-instansi itu (Badan Pertanahan Nasional/BPN, bupati Batang, dliRed.) menunggu UGM untuk melepas tanah. Jadi, dulu memang pernah BPN datang ke Pagilaran untuk melakukan pengukuran ulang tanah. Hasilnya kurang satu Ha dari yang tercantum di HGU (Hak Guna Usaha). Dari awal sudah ditekankan oleh BPN Pusat, bahwa pengukuran itu merupakan awal proses penyelesaian masalah, bukan akhir. Tapi, PT. Pagilaran menganggap bahwa pengukuran tanah selesai, maka secara hukum kasus juga sudah selesai. Padahal untuk tanah-tanah yang diklaim petani yang jumlahnya 450 Ha itu belum pernah direalisasikan penyelesaiannya seperti apa. Sekarang, status tanahnya masih HGU atas nama PT. Pagilaran-UGM sampai tahun 2008.

Apa yang menjadi latar belakang kasus ini?

Jadi kalau bicara hubungan sejarah, UGM tidak bisa dipisahkan dari PT. Pagilaran. Ketika terjadi nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1945-1966, perkebunan Pagilaran diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Setelah itu, dikonversi menjadi HGU yang diberikan langsung kepada UGM untuk kebun penelitian berdasar Tri Darma Perguruan Tinggi. Waktu itu, tanah yang diberikan oleh PN (Perkebunan Negara) Pagilaran 663 Ha dan masyarakat masih tetap menggarap. April 1966, terjadi pencabutan tanah-tanah petani oleh pimpinan kebun PN Pagilaran, T. Candrabarata. Mereka menginstruksikan kepada seluruh para petani penggarap di sana supaya selekasnya pergi dari tanah garapannya karena dianggap itu adalah garapan Gestapu (PKI). Kemudian HGU kedua keluar tahun 1969-1989 seluas 863 Ha. Padahal luas tanah asli PN Pagilaran tidak sejumlah itu. Jadi dalam kurun waktu itu terjadi pencaplokan tanah masyarakat supaya luasnya sama dengan sertifikat.

Atas nama siapa HGU tersebut, UGM, PT. Pagilaran atau Fakultas Pertanian?

Sejak awal masih sama milik YPFP (Yayasan Pembina Fakultas Pertanian) yang sebagian besar adalah dosen. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Fakultas Pertanian lepas dari UGM secara keseluruhan.

Bagaimana prosedur pencabutan HGU?

BPN datang ke lapangan kemudian meneliti secara administratif. Dan ketika mereka memutuskan untuk mencabut, maka otomatis, tanah menjadi milik negara.

Proses hukumnya sudah sampai mana?

Ini adalah bagian dari proses hukum. Bentuk-bentuk advokasi yang sudah kami lakukan antara lain kampanye (buku, seminar, diskusi), lobi. Di skala makro, sekarang sedang digodok RUU perkebunan untuk mengatasi konflik-konflik sumber daya perkebunan, dan itu jelas untuk privatisasi modal, ini yang harus dicegah dulu. Di skala mikro, masyarakatnya, kami melakukan pendidikan kritis, pengorganisasian, penyadaran hak. Di tingkat kebijakan, kami melakukan lobi.

Apa latar belakang terjadinya aksi di UGM Februari lalu?

Mereka menyiapkan aksi 2003 selama berbulan-bulan dengan harapan bisa bertemu dengan UGM untuk silaturahmi dan berdialog secara baik. Karena dari beberapa advokasi ke DPRD, gubernur, bupati, BPN sampai ke Jakarta hasilnya nol. Mereka tidak akan mau mencabut HGU tanpa persetujuan UGM. Makanya bukan tanpa alasan, mereka datang ke UGM dengan itikad baik.

Apa yang menjadi tuntutan?

Tanah, upah dan peningkatan kesejahteraan buruh Mereka menginginkan agar tanah itu kembali sebagai lahan garapan dan pemukiman, UMR sesuai standar, santunan yang layak, jaminan keselamatan kerja.

Targetnya?

Silaturahmi, ingin meminta tanggung jawab moral dari UGM sebagai kampus rakyat. Tapi respon yang diterima adalah "kami tidak berwenang, petani salah kalau datang kesini."

Sejauh mana keterlibatan LBH Semarang dalam kasus ini?

Kami sebagai kuasa hukum. Ada masalah ketidakadilan dan pelanggaran HAM, itu yang kita kerjakan.

Dalam aksi, ada orator yang bilang ini adalah sarana latihan politik, bagaimana tanggapan Anda?

Ini proses pendidikan politik masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran politik petani. Selama ini ada hegemoni PT. Pagilaran.

Respon masyarakat Pagilaran sebagai institusi seperti apa?

Dulu mereka masih berharap pada UGM. Tapi setelah aksi kemarin, kami kurang tahu ya. Mengingat mereka tidak diterima dengan baik.

HGU akan habis tahun 2008, bagaimana Anda menyikapi?

Hak atas tanah akan kembali pada negara, meskipun secara hukum ada hak bagi pemilik HGU yang lama untuk memperpanjang, tapi kan disini ada sengketa. Amanat UUD dan Tap MPR No. IX tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam secara lebih adil.

Dia | Soundny

Konflik Tanah, Kemiskinan da

Oleh Ridwan*

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat?"

Subuh, pagi hari. 26 Februari 2003 tampaknya menjadi hari yang bersejarah bagi kampus Gadjah Mada. Betapa tidak, sekitar 3000 petani teh, terdiri dari kakek-nenek, orang tua dan anak-anaknya, berdemo dengan lugu namun penuh semangat. "UGM kampus penindas!" teriak mereka.

Kunjungan "tamu" UGM ini sontak menjadi kesibukan tersendiri bagi aktivis mahasiswa yang tidur di Gelanggang. Belasan pegiat KM (Keluarga Mahasiswa) menjadi pemandu jalan bagi para petani yang ingin bersih diri dan sholat, sementara aktivis UKESMA (Unit Kesehatan Mahasiswa) mendadak sibuk karena banyak dari para petani yang sakit setelah menempuh perjalanan hampir tujuh jam berdesak-desakan dalam truk-truk yang mengangkut mereka.

Terlepas dari kehangatan pagi itu, kita belajar satu hal bahwa perlawanan terhadap penindasan (baca: ketidakadilan sosial) bisa muncul kapan saja, di mana pun dan oleh siapa pun. Selama kemiskinan dan ketimpangan sosial terus ada di muka bumi maka selama itulah gerakan perlawanan akan terus bangkit, tumbuh dan membesar.

Kemiskinan yang dialami oleh seseorang ataupun sekelompok orang sudah tentu merupakan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak menguntungkan. Pertama, kemiskinan akan menghalangi manusia untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik maupun sosial. Kedua, kemiskinan dalam sebuah komunitas tertentu akan menciptakan kultur yang berbeda dari kultur golongan "mampu". Dan akibatnya terjadi ketimpangan sosial atau gap sosio-kultur yang akan semakin menjauhkan kehidupan mereka dari kehidupan sosial yang bermartabat.

Di Indonesia, ada kaitan yang erat antara kemiskinan (atau proses pemiskinan?) dengan struktur agraria. Dengan model pembangunan di Indonesia yang tak lain hanyalah "baju baru" kapitalisme, yang di dalamnya tentu sarat dengan praktek akumulasi kapital yang tidak berkeadilan (Wolfgang Sachs,1995).

Dalam strategi agraria kapitalis, sarana produksi yang utama (tanah) dikuasai individu-individu non penggarap. Hubungan antara kepemilikan tanah dan pekerjaan sifatnya terpisah.Tenaga kerja adalah komoditi, sementara tanggung jawab dan pengambilan keputusan produksi, akumulasi dan investasi sepenuhnya di tangan pemilik tanah. Dua akibat yang muncul adalah penguasaan tunggal atas sarana produksi (tanah) dan hubungan produksi yang eksploitatif dan tidak humanis.

Sejarah mencatat bahwa ini berkembang sejak masa kerajaan maupun ketika imperialisme dan kolonialisme masuk. Petani diposisikan sebagai ujung tombak produksi yang tidak punya daya tawar. Bahkan, tiap usaha untuk memperjuangkan haknya itu akan dianggap sebagai bentuk pemberontakan yang harus diberangus dan dihabisi. Misalnya, dengan memberi stigma "kiri", "PKI" atau menghadapkannya dengan norma agama yang mensyaratkan kepatuhan.

Masalah lain muncul ketika tuntutan akumulasi modal itu membawa perubahan-perubahan penting di masyarakat lokal yang masih memiliki adat yang kuat. Ini terjadi, misalnya, pada masyarakat Gunung Kamulyan yang dirugikan oleh PT. Pagilaran. Masalah-masalah baru yang muncul seperti proses penyingkiran tanah, hukum, dan kebudayaan masyarakat lokal.

Tentu saja, proses pemiskinan dan penindasan sosial melalui struktur agraria ini, membuat petani melawan. Tercatat sejak tahun 1903, telah muncul gerakan perlawanan di Sudoarjo (gerakan Kasan Mukmin di Sudoarjo). Namun pada akhirnya, gerakan-gerakan itu selalu berbenturan dengan kepentingan politik jangka pendek. Bahkan tak jarang juga disertai kekerasan, seperti kasus Kedung Ombo, Lumbung Kerep Klaten, dan Bandar Betsy di Sumatera Utara.

Sejarah juga mencatat inkonsistensi negara (pemerintah) dalam beberapa kasus konflik tanah di Indonesia. Pemerintah yang seharusnya menjalankan amanat pembukaan UUD 1945 ternyata telah berkhianat. Jelas sekali, UUD 1945 mengatakan bahwa pembentukan pemerintahan salah satunya berfungsi untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat (umum). Pasal 33 secara tegas menyebutkan bahwa segala sesuatu

n Tanggung Jawab Pemerintah
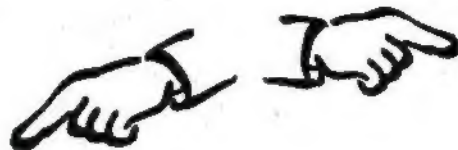
yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak tidak bisa dikuasai oleh perseorangan, melainkan harus mempunyai fungsi sosial.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksistensi negara ditunjukkan oleh adanya kemudahan akses rakyat pada tanah. Jika rakyat tidak menguasai tanah, maka sama artinya dengan berada di negeri jajahan. Membagi tanah secara adil, merupakan bagian dari cita-cita membangun masyarakat adil dan makmur. Pemerintahan Megawati (dan juga sebelumnya) tampaknya tidak sepenuhnya memahami esensi di atas. Yang terjadi justru mereka melarikan diri dari masalah dengan dalih hanya sebagai fasilitator (seperti Badan Pertanahan Nasional/BPN Semarang dalam kasus Pagilaran).

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (tentang Pokok-pokok Agraria/UUPA) yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebenarnya berangkat dari keberpihakan pada petani. Tapi dengan munculnya kebijakan ini, tidak berarti masalah selesai. Yang terjadi justru bertolak belakang dengan agenda pembaharuan agraria. Muncul konflik baru antara pihak yang menguasai tanah skala besar dan para penggarap.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemerintah berpihak pada rakyat kecil? Kasus PT. Pagilaran nampaknya tidak menunjukan demikian. Pemerintah seharusnya ingat bahwa ada hubungan erat dan saling terkait antara kepemilikan atas tanah, kemiskinan, dan kualitas kehidupan.

Jika rakyat yang sudah merdeka (?) sejak tahun 1945 masih merasa terjajah di tanah kelahirannya sendiri maka di manakah sebenarnya tanggung jawab pemerintah? Atau barangkali sebagian besar masyarakat Indonesia (terutama yang miskin) sudah tidak lagi merasa memiliki pemerintah yang sebenarnya hanya hasil kompromi politik segelintir orang itu? Wajar, karena bagi mereka toh tidak ada bedanya ada pemerintah atau tidak: mereka tetap saja tertindas. Kalau rakyat sudah sepesimis itu maka pemerintah tinggal punya dua pilihan. Pertama, pemerintah sadar dan segera mengubah keberpihakannya dari kaum pemodal, terutama asing (IMF, CGI, World Bank), beralih pada rakyat miskin yang tertindas. Atau pilihan kedua, pemerintah mundur secara sukarela karena ketidakmampuan mereka mengelola konflik dan menyejahterakan negeri.

Jika kedua pilihan itu tidak diambil oleh pemerintah maka pilihan perlawanan akan senantiasa diambil oleh rakyat dan gerakan mahasiswa pro-demokrasi sampai keadilan sosial dan kesejahteraan benar-benar terwujud.

* Divisi Aksi & Propaganda BEM KM UGM, masih kuliah di Hub. Internasional Fisipol UGM

Gerakan Islam Global

Judul Buku	: Seruan-Seruan Islam, Tanggung jawab Sosial dan Kewajiban Menegakkan Syariat
Penulis	: Dr. Kalim Siddiqui
Penerjemah	: A. Affandi & Humaidi
Penerbit	: Pustaka Pelajar
Tahun	: Desember, 2002
Tebal	: 408 + xvi halaman

...Yang lampau bertahan terus dalam diri manusia, tapi tiap saat berciri baru juga (Bergson)

Bagi umat Islam, sejarah bukan cerita yang berlalu dan dilupakan begitu saja. Ayat-ayat Al-Qur'an menyimpan bermacam kisah masa lalu yang penuh tabir makna. Di sisi lain, sifat neojahiliyah zaman kontemporer seperti kini menunjukkan bahwa masalah umat Islam saat ini tak beda dengan masalah pada masa Nabi Muhammad SAW. Hanya bentuk dan skalanya saja yang berubah. Semua problem masa kini pernah muncul waktu itu.

Kerangka dasar ini dipegang teguh oleh Kalim Siddiqui di dalam tiap pemikirannya mengenai gerakan Islam. Di dalam buku yang sedang anda apresiasi ini, Siddiqui sekali lagi membuktikan dirinya sebagai tokoh visioner gerakan Islam kontemporer. Peraih gelar doktor di bidang hubungan internasional itu menandaskan soal tahapan yang harus dilalui untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya sumber alternatif dari peradaban global. Diawali gerakan Islam global untuk mencapai sebuah revolusi Islam, dan akhirnya tercipta negara Islam.

Siddiqui tak lupa mengajukan kritik-kritiknya terhadap peradaban Barat. Demi menghindari cap sebagai "anak haram" sejarah, Barat mencoba mengkonstruksi sejarah dengan sarana ilmu pengetahuan untuk melegitimasi keberadaannya. Sialnya, banyak cendekiawan muslim yang dicuci otaknya dengan gagasan-gagasan filosofis Barat. Walau tak cukup dijelaskan di buku ini, menjadi seorang cendekiawan muslim juga berarti wajib mengislamkan keilmuan mereka.
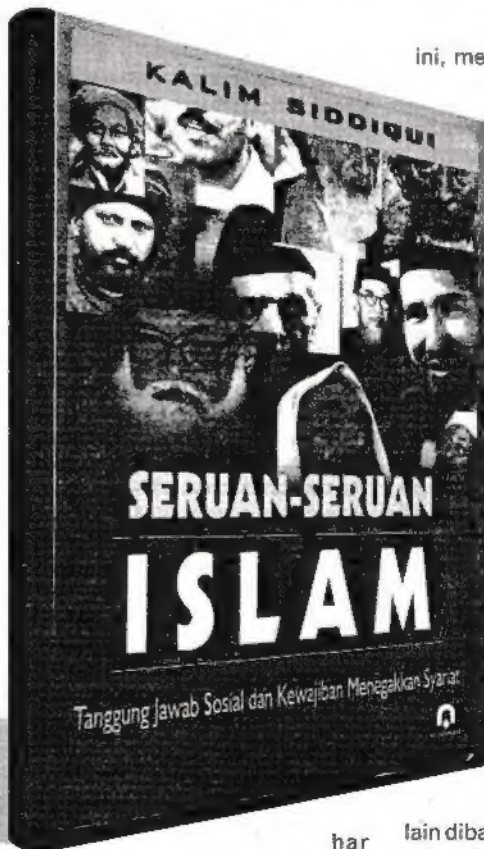
13 bab buku ini semakin menegaskan sikap Siddiqui yang antidemokrasi. Nasionalisme bukan hal yang islami baginya. Di sisi lain, ia menganggap Islam takkan sempurna tanpa negara. Dalam klasifikasi kesarjanaan muslim versi Akbar S. Ahmed, posisi Siddiqui sejajar dengan Shabbir Akhtar dan Ziauddin Sardar yang termasuk golongan radikalditandai dengan kebencian mereka terhadap Barat.

Walau disana-sini dijumpai istilah-istilah yang membuat kening berkerut, buku yang membahas pergerakan Islam radikal ini cukup memberikan perspektif lain dibandingkan bukubuku sejenis yang berwatak tradisionalis-modernis. Alhasil, dengan membaca buku ini kita akan dihadapkan pada visi dan konsistensi Siddiqui dalam mempersiapkan sebuah gerakan Islam berskala global.

Heri

Seandainya Vagina dapat berbicara

Jika vagina dapat berbicara, apa yang akan dikatakannya. Pementasan teatrikal yang mengangkat tema "Vagina Monolog" kembali menambah marak aksi penolakan atas kekerasan terhadap wanita. Pertunjukan (7/3) ini memang menarik karena turut diramaikan oleh beberapa artis ibukota. Para penonton pun berjubel-jubel menyaksikannya.

Adalah Ria Irawan, Ayu Azhari, serta Jajang C.Noer, artis ibukota yang turut andil dalam pementasan tersebut. Aksi mereka yang masing-masing berdurasi sepuluh menit itu begitu membuat penonton terpukau. Pementasan tersebut bertempat di gedung Sendratasik Universitas Negeri Yogyakarta. Karya Eve Ensler ini benar-benar terasa familiar dan membumi karena semangat perjuangan yang dibawanya terasa khas nuansa kekiniannya. Didukung oleh segenap insan seni teater, pementasan tersebut secara keseluruhan menghabiskan waktu kurang lebih dua jam.

Terlaksananya karya ini tidak lepas dari semangat Vagina Day, yakni sebuah hari besar yang dipersembahkan untuk mengangkat posisi wanita dari kemarginalannya ditengah-tengah kultur patriarki. Acara tersebut digelar oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi Wilayah Daerah Yogyakarta. Dengan semangat perjuangan yang luar biasa dari pejuang feminisme, berbagai daya cipta kemudian lahir sebagai penggugah, pencerah, dan khususnya menjadi sarana menyampaikan pesan-pesan sosial.

Vagina monolog adalah pengungkapan sebuah misteri yang juga penuh dengan keunikan, bahkan kerumitan, karena vagina adalah sebuah wilayah bagi kaum hawa yang sangat tabu untuk diperbincangkan. Tapi anehnya, menurut Ensler, vagina justru menjadi sebuah corong dimana kaum hawa dapat memuaskan, melampiaskan, dan menikmati libido seksualitasnya serta menujukkan eksistensinya. Ketika nilai-nilai etika telah dibongkar, vagina tidak lagi menjadi tabu untuk dibincangkan, maka saat itulah kaum hawa memperlihatkan ekspresinya. Mereka tidak lagi malu dan takut, malah sebaliknya, mereka merasakan senang, bahagia, sampai akhirnya memunculkan kegairahan tersendiri.

Vagina Monolog adalah kritik kebudayaan. Nilai dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya bermaksud menunjukkan fakta bahwa kaum hawa saat ini masih eksis dalam dominasi kekuasaan kaum pria. Oleh karena itu, feminisme dijadikan sebagai senjata untuk melawan dominasi pria. Perlawanan tersebut muncul dari adanya fakta bahwa keberadaan kaum adam selalu mendominasi yang lain dalam setiap kebudayaan yang ada di dunia. Selain sebagai senjata, feminisme juga menjadi tameng ideologis untuk berlindung dari kekerasan yang selama ini menimpa mereka dalam hampir semua hal dalam setiap peristiwa.

Vagina Monolog adalah proses perlawanan. Pementasan ini dihadirkan di beberapa kota di dunia, diantaranya adalah Jakarta dan Yogyakarta yang mewakili Indonesia. Perlawanan itu berawal dari ide seorang individu, menjalar dan menyebar ke seluruh dunia, terus berproses, muncul dalam beragam wujud. Salah satunya berupa pementasan seni teater. Dengan mengangkat isu perdamaian, kesetaraan gender, dan perlawanan, para pionirnya mencoba menyebarkannya keseluruh penjuru dunia betapa terjajahnya wanita melalui kekerasan, perang, diskriminasi, pelecehan, perkosaan, perdagangan orang. Hal ini mengindikasikan masih adanya tanda bahwa keadilan dan demokrasi belum benar-benar terwujud.

Vagina Monolog adalah deskripsi dari suka dan duka. Bila vagina dapat berbicara, maka tentu ia akan bercerita betapa indah fantasi keinginan dan hasrat yang dimilikinya. Juga ia akan berkeluh kesah betapa sengsaranya menjadi vagina karena perlakuan yang selama ini menimpanya dalam kekerasan demi kekerasan yang tak kunjung berakhir.

Ulil

-UGM di demo Petani

Bagaimana kalau diadu dengan demonya mahasiswa?

-Katanya, mahasiswa MIPA yang *nggak* bayar BOP tidak dapat KTM dan dianggap bukan mahasiswa UGM

Wah mahalnya harga sebuah KTM!

"SAYA MASUK UGM KARENA INGIN MASUK TEATER"

"Suatu ketika, pernah saya ditanya oleh seorang teman. Apakah saya suka sekolah (kuliah)? Tidak, jawab saya. Lalu kenapa kamu tetap kuliah?, tanyanya balik, saya masuk UGM karena ingin masuk Teater Gadjah Mada (TGM)."

Demikian Heru Sambawa mengenang pertama kali ia memutuskan untuk terjun ke dunia teater. Memulai aktivitas sebagai anak teater di TGM sejak tahun 1973. Hingga kini, setelah memiliki tiga putra, ia masih meluangkan waktu untuk aktif di TGM. Bukan sebagai aktor yang ikut manggung, melainkan berperan sebagai pengemong anak-anak TGM.

Bukan tanpa alasan kenapa pria kelahiran Boyolali ini masih peduli pada TGM. Baginya, seni adalah sebuah hasrat kreatifitas yang harus disalurkan. Sebuah kegelisahan artistik menurut Mas Heru,demikian ia biasa disapa, yang tidak menemukan media untuk tumpahan libido nyeni-nya akan mengakibatkan kebuntuan daya kreasi. Dan di TGM, penikmat sayuran ini bisa menemukan komunitas seni yang telah lama akrab dalam kehidupannya. Ia menjadikan TGM sebagai tempat yang bisa mewadahi ide-kreatif yang sering muncul. Dengan cara berdikusi dan berpartisipasi langsung dalam latihan-latihan peran ia berbagi pengalaman dengan para generasi penerusnya. Ia sangat menikmati saat-saat kumpul bareng, ngomong ini-itu tentang dunia teater dan pengalaman-pengalamannya.

Tak salah jika banyak awak TGM menaruh salut pada pria bertubuh bongsor ini. Bukan hanya sikap egaliter dan ramah yang menjadi pemikat, tapi pria lulusan Akademi Drama Antwarpen Belgia ini memiliki banyak obsesi progresif yang ingin membawa TGM lebih maju. Kritik konstruktif dengan membandingkan TGM masa lalu dengan keadaan sekarang menjadikan awak TGM lebih mengerti posisi untuk lebih kreatif. "Dulu dengan keterbatasan saya dan kawan-kawan mampu mengatasi masalah. Sekarang, dengan fasilitas yang lebih memadai, harus lebih bisa mengatasi permasalahan keteateran" demikian Mas Heru berfilosofis untuk menggugah kembali semangat awak TGM. Bagi pria kelahiran 24 Mei 1954 ini, hal penting lain dengan "menoleh" masa lalu itu, agar bisa berbuat lebih dari yang sebelumnya.

Saat disinggung mengenai kondisi TGM sekarang, Mas Heru menyoal masalah tempo aktif mahasiswa diluar kuliah yang terlampau pendek. Menurutnya, masa studi dengan tenggat waktu yang dibatasi membuat mahasiswa tidak bisa beraktivitas diluar kuliah secara lebih, semisal di TGM. Jika masa studi sekitar empat sampai lima tahun, maka masa aktif mahasiswa di TGM maksimal tiga tahun. Dengan masa yang sangat singkat itu, sulit bisa membentuk aktor atau aktris yang mumpuni.Tapi hal itu bisa disiasati dengan menggelar pertunjukan. "Kita sudah berusaha untuk, paling tidak setiap tahun, mengadakan pertunjukan setiap tahun dengan mengangkat drama komedi, tragedi, atau melodrama. Dengan begitu diharapkan anak-anak TGM mampu berperan pada macam-macam bentuk drama itu." Harapnya.

Lebih dari itu, ia memimpikan TGM di masa mendatang lebih maju, lebih berkualitas. TGM merupakan representasi dari dua kata: teater dan Mahasiswa. Dan juga ia berharap TGM bisa membuktikannya dengan mempertunjukkan drama-drama yang cerdas. "Sekalipun ide ceritanya sederhana, ia harus diproduksi dengan cerdas" ujarnya bersemangat.

Berbicara tentang dunia teater, lulusan Fak Ekonomi dan Hukum ini selalu memposisikan teater sebagai "adegan kehidupan". Ketika berperan dalam drama komedi, menurut Mas Heru, berbeda dengan peran aktor dalam drama tragedi, dan melodrama. Tiga paradigma drama itu memiliki karakteristik tertentu yang merupakan analog dari kehidupan sehari-hari. Dengan berbekal itu, Mas Heru merasa selalu bisa mengatasi permasalahan hidup.

Lukman
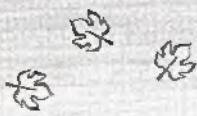
BALKON
BALAIRUNG KORAN

DITERBITKAN OLEH
BPPM UGM BALAIRUNG
Penanggungjawab: Tarli Nugroho **Koordinator**: Indie Aunullah **Tim Kreatif**: Bambang, Heru, Uji, Adit, Daniell **Editor**: Iqbal Jr, Fauzul, Irfan, Ojie, Nanik **Redaksi**: Gilang, Mamad, Lukman, Soundny, Dia, Ulil, Arief, Dewi, Nining, Endah, Tyas **Risdok**: Elis, Oran, Heri, Anas, Kurnia **Perusahaan**: Dika, Tika, Titi, Natsir **Produksi**:Bondy, Abib, Angga, Asa,
ALAMAT REDAKSI DAN SIRKULASI: BULAKSUMUR B-21 YOGYAKARTA 55281, TELEPON:(0274) 901077, FAX:(0274)566171, E-MAIL: BALKON.UGM@EUDORAMAIL.COM, REKENING BCA YOGYAKARTA No.0372072120 A.N WIDHI BUDIARTATI +++
GRATIS TIAP SENIN DI: UPT I, UPT II, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA, MASJID KAMPUS, BONBIN SASTRA, GELANGGANG MAHASISWA, WARTEL KOPMA, PARKIR TP, KAFETARIA KOPMA, FASNET TEKNIK, KPTU TEKNIK, WARNET EKONOMI, PLAZA FISIPOL, KANTIN BIOLOGI, KANTIN PETERNAKAN, KANTIN FILSAFAT, FAKULTAS-FAKULTAS LAIN, DAN BULAKSUMUR B-21

Permainan Yang Usang

Saya ingat, tanggal 26 Februari lalu, siang hari, ratusan massa yang menamakan diri Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB), mendatangi UGM dengan mengendarai berpuluh-puluh truk. Mereka menganggap UGM adalah pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya hak kepemilikan tanah mereka. Sedangkan UGM sendiri mengaku, bahwa masalah tanah yang dipersengkatan itu bukanlah menjadi tanggung jawabnya.

Tak ada hal baru yang menyolok dari aksi yang digelar itu. Tetap terlihat sama dengan dengan aksi-aksi serupa lainnya yang sering digelar oleh berbagai kelompok mahasiswa, yang selalu membawa massa, meneriakkan yel-yel dan tuntutan, serta menyita perhatian publik. Tapi sejenak ada sesuatu yang luput dari perhatian publik. Sebab di sana ada sekelompok kecil petani yang seolah tak begitu menghiraukan apa yang diteriakkan oleh anggota aksi lain serta pemimimpinnya yang begitu bersemangat meneriakkan yel-yel dan serta tuntutan yang dilontarkan untuk UGM. Para petani yang "asyik sendiri" itu, terlihat sangat santai dengan apa yang berada di hadapan mereka. Nasi bungkus, sebatang rokok serta satu porsi mi ayam yang dibeli pada saat itu juga.

Sejenak, masalah yang sedang disuarakan oleh FPPB itu adalah hal yang wajar. Sebab, petani memiliki hak untuk menuntut siapa saja yang bertanggungjawab atas pelanggaran yang menimpa mereka. Kewajaran yang lain adalah, setiap masalah yang berhubungan dengan ketidakadilan, seperti masalah penguasaan tanah yang dilakukan secara sepihak oleh kelompok tertentu, selalu menimpa golongan yang lemah secara finansial maupun kekuasaan.

Terlihat, bahwa hal itu adalah sebuah skenario besar yang selalu memposisikan dua pemain yang memiliki karakter yang bertolak belakang, yaitu pemain yang protagonis dan antagonis. Terlepas dari apakah itu adalah takdir Tuhan, yang pasti aktor protagonis yang notabene inferior dan berjumlah dominan, selalu berada dibawah tiran yang berwatak antagonis yang notabene superior. Dan, skenario yang dianggap universal itu selalu terjadi dan berulang disetiap kesempatan dan interval waktu. Seperti yang terlihat dari sengketa tanah antara PT. Pagilaran dengan masyarakat yang tergabung dalam FPPB, aktor-aktor yang terlibat pun juga tak begitu jauh-jauh dari dua sifat tadi. Selalu saja ada golongan yang menindas dan golongan yang tertindas, bahkan ada juga yang berusaha yang memanfaatkan momen itu.

Bisa ditebak kemudian, pihak lain yang berposisi sebagai penonton, dan berada di luar permasalahan yang terjadi, dibuat muak oleh berbagai suguhan semacam itu. Di samping golongan inferior itu sendiri yang juga telah lelah dengan ketidakadilan yang selama ini mereka peragakan. Yang dibutuhkan saat ini adalah metode dialogis yang sejajar untuk menemukan setitik keadilan. Oleh sebab itu tak bisa ditunda lagi, permainan dengan skenario yang telah usang itu harus segera di-stop.

Kiranya untuk saat ini, jangan salahkan setiap orang yang sedang jenuh dengan tontonan ketertindasan dan ketidakadilan, untuk kemudian memilih goyangan. *Cihuy.......*

Penginterupsi

si iyik

Asa.balairung

LAHAN PENGEMBANGAN KOMODITI PT.PAGILARAN

PRODUK	LUAS	KAPASITAS PRODUKSI	HARGA PRODUK	KETERANGAN
Teh	983,711 Ha	25 - 30 ton (daun pucuk basah) sehari	US Cent 110,26/kg (bursa auction Jakarta, Jan '01)	1 kg pucuk daun menghasilkan 20 ons teh
Kina	18,420 Ha	–	$ US 54,56/kg	Panen dilakukan 8 tahun sekali
Kopi	15,420 Ha	rusak	–	–
Cengkeh	19,520 Ha	rusak	–	BPT
Kakao	–	–	Rp 56,546/kg	Lahan dikonversi ke lahan tumpangsari
Tumpangsari Kopi Cengkeh	10,00 Ha	–	–	–
Tumpangsari Kakao Cengkeh	28,810 Ha	–	–	–
Plot Percobaan Teh	4,140 Ha	–	–	–

JURNAL BALAIRUNG

menerima artikel, tulisan dan sejenisnya

di alamatkan ke REDAKSI Jurnal 37 BALAIRUNG B 21